
Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme

Sebuah Landasan Normatif-Institusional

Muh. Syamsuddin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: udinalmadury@gmail.com

Abstract

This paper examines the debate and internal dynamics of the Muhammadiyah's da'wa movement in Kotagede on easing the multiculturalism context. With the debate, how did the Muhammadiyah of Kotagede understand the phenomenon of multiculturalism as the reality real life ultimate? So, how is the involvement of Muhammadiyah member institutionally in its role in addressing multiculturalism? Furthermore, what methods and strategies are applied in easing the discourse of multiculturalism? Departing from Nakamura's early work, which examines the reformist-modernist movement in anthropological perspective, this article is also based on a phenomenological-naturalistic qualitative approach that reveals the truth of the facts in the field until it is interpreted to be a novelty of meaning. It's expected can contribute positively to the development of multiculturalism in the framework of pluralism (diversity) and Pancasila to meet a harmonious nation life. Thus, the facts in the field found that the debate of Muhammadiyah member questioning the discourse of multiculturalism was preceded by the congress Bali in 2002s when the advisory of council (Dewan Tanwir) decided the meaning of amar ma'ruf nahi munkar (calling for good, preventing evil) was not only interpreted as textuality, but how the progressive movement that carried the issue of 'cultural da'wa' (dakwah kultural) was implemented well. Based on the result of a decision, Muhammadiyah's own member internally can be mapped into three groups, namely puritan, moderate, and reformist. Although the 'cultural da'wa' is much opposed by the Puritans, in fact is just few agree with the group. The echoes of moderate and reformist groups are larger, the whole multicultural movement can be implemented well to the grassroots.

Keywords: mulitculturalism, Muhammadiyah's of da'wa movement, a normative-institutional of foundation



Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang perdebatan dan dinamika internal gerakan dakwah Muhammadiyah di Kotagede dalam membumikan konteks multikulturalisme. Dengan adanya perdebatan tersebut, bagaimana warga Muhammadiyah Kotagede memahami fenomena multikulturalisme sebagai realitas kehidupan hakiki? Lantas, bagaimana keterlibatan warga Muhammadiyah tersebut secara institusional dalam peranannya menyikapi multikulturalisme? Selanjutnya, metode dan strategi apa yang diterapkan dalam membumikan wacana multikulturalisme? Berangkat dari tesis awal Nakamura, yang mengkaji gerakan reformis-modernis dalam perspektif antropolog, artikel ini juga dilandasi dengan pendekatan kualitatif fenomenologis-naturalis yang mengungkap kebenaran fakta di lapangan hingga diinterpretasikan menjadi sebuah kebaruan makna. Di mana harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan multikulturalisme dalam bingkai pluralisme (*diversity*) dan Pancasila guna menyongsong kehidupan berbangsa yang harmonis. Dengan begitu, fakta di lapangan ditemukan bahwa perdebatan warga Muhammadiyah menyoal wacana multikulturalisme diawali hasil muktamar Denpasar Bali tahun 2002 ketika dewan tanwir memutuskan makna amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya dimaknai sebatas tekstualitas, tapi bagaimana gerakan berkemajuan yang mengusung isu 'dakwah kultural' diimplementasikan dengan baik. Dalam perjalanannya, hasil keputusan tersebut warga Muhammadiyah sendiri secara internal dapat dipetakan menjadi tiga kelompok, yakni puritan, moderat, dan reformis. Walaupun 'dakwah kultural' banyak ditentang oleh kelompok puritan, faktanya sedikit yang sepakat dengan kelompok tersebut. Gaung kelompok moderat dan reformis lebih besar, secara utuh gerakan multikulturalisme dapat diimplementasikan dengan baik hingga ke akar rumput (*grassroots*).

Kata Kunci: multikulturalisme; gerakan dakwah Muhammadiyah; landasan normatif-institusional.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekitar 13.000 pulau baik skala besar maupun kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu

serta berbagai macam aliran kepercayaan.¹ Keragaman, kebhinekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan di waktu-waktu mendatang.

Keragaman ini, diakui atau tidak, dapat menimbulkan berbagai persoalan jika tidak ada langkah konkrit untuk merawatnya seperti yang sekarang dihadapi bangsa ini; percikan konflik sosial semakin memperuncing keadaan di sana sini. Dengan demikian, upaya mengungkap keterlibatan warga Muhammadiyah dalam mensosialisasikan dan mengaktualisasikan semangat multikulturalisme sangat signifikan perlu dilakukan. Hal ini mengingat kondisi bangsa Indonesia yang masih rawan akan adanya konflik sosial akibat kesalahpahaman terhadap persoalan SARA. Dengan meneliti keterlibatan warga Muhammadiyah dalam proses sosialisasi dan aktualisasi semangat multikulturalisme akan dihasilkan sebuah tawaran tentang visi dan konsep bagi pengembangan kehidupan masyarakat Indonesia dengan bersendikan semangat multikulturalisme. Di samping itu, akan dapat dirumuskan sebuah strategi pengembangan kehidupan masyarakat yang *compatible* dengan bingkai sosiologis bangsa Indonesia yang majemuk.

Dalam konteks itu, keberadaan warga Muhammadiyah dalam semangat multikulturalisme menarik untuk dilihat karena mereka kini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Sejauh ini telah muncul beberapa organisasi keislaman maupun kelompok pengajian yang berhaluan eksklusif di Yogyakarta. Kelompok ini menjadikan beberapa masjid kampus yang ada sebagai markas kegiatannya. Kelompok ini aktif mewacanakan pentingnya menegakkan syari'at Islam melalui pamflet, brosur, spanduk dan forum-forum ilmiah. Tentu saja keberadaan aktivis Muslim berhaluan eksklusif menjadi sebuah tantangan baru bagi kegiatan sosialisasi dan aktualisasi semangat multikulturalisme. Mau tidak mau warga Muhammadiyah dituntut menyusun berbagai strategi dan langkah

¹ Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 45. Lihat juga, Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2007), hal. 98.

dalam mensosialisasikan semangat multikulturalisme di masyarakat sebagai bagian dari *counter discourse* terhadap maraknya kampanye eksklusivitas dari kelompok lain.

Di Muhammadiyah sendiri, secara internal, sebetulnya multikulturalisme sejak awal telah menampilkan wajahnya. Hal ini terjadi ketika Muhammadiyah sejak tahun 1920-an telah meluas dan berkembang ke luar wilayah Yogyakarta, dan kemudian bersentuhan dengan budaya lokal dan tradisi setempat yang tercermin pada sikap, watak, dan kebiasaan orang-orang yang masuk menjadi anggota atau pimpinan Muhammadiyah. Karena itu, Muhammadiyah di Jawa berbeda dengan Muhammadiyah di Sumatera atau daerah lain. Proses itu dipandang fenomenal karena memerlukan sikap terbuka, kreativitas, moderat, toleran serta keberanian warga Muhammadiyah untuk bereksperimen, membuang sekat-sekat primordialisme dan mereduksi label-label ideologis lainnya. Keterlibatan warga Muhammadiyah ini dalam gerakan multikulturalisme patut dilihat lebih jauh, karena mereka dianggap telah bekerja pada tataran gagasan maupun tataran praksis. Secara konseptual, mereka diasumsikan telah berhasil membahasakan prinsip-prinsip multikulturalisme berdasarkan perspektif Islam.

Dalam konteks global, multikulturalisme bisa dipahami dengan kenyataan berbeda-bedanya kebangsaan, kebudayaan, bahasa, pandangan hidup, ideologi, dan sebagainya. Dengan demikian multikulturalisme itu hadir dalam berbagai skala, ruang lingkup, aspek, dan dimensi kehidupan manusia.² Di sini, menarik untuk diuji sejauh mana tingkat konsistensi ide-ide multikulturalisme yang mereka suarakan dengan aktualisasinya dalam praktek di lapangan. Dengan mengamati keterlibatan warga Muhammadiyah dalam sosialisasi dan aktualisasi semangat multikulturalisme sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian terhadap warga Muhammadiyah baik secara institusional maupun pribadi warganya, dengan menggunakan perspektif multikulturalisme sangat dibutuhkan agar muncul kesadaran

² Asep Purnama Bahtiar, "Dakwah Kultural dalam Konteks Multikulturalisme: Dialektika Agama dan Budaya yang Continuum?", Abd. Rohim Ghazali, (ed.), *Muhammadiyah Progressif Manifesto Pemikiran Kaum Muda*, (Yogyakarta: JIMM-LESFI, 2007), hal. 94-104.

yang lebih mendalam akan makna dari sebuah keberagaman budaya. Dengan demikian, melalui penelitian ini pula diharapkan dapat merekonstruksi dan sekaligus menemukan pola baru yang khas yang dapat dijadikan dasar bagi warga Muhammadiyah dalam mengembangkan semangat multikulturalisme. Di mana konteks multikulturalisme erat kaitannya dengan keragaman yang merupakan bagian dari keniscayaan sejarah manusia sejak mengalami tragedi keterlemparan.³ Keragaman tersebut meliputi dimensi-dimensi alamiah dari manusia, seperti warna kulit, bentuk tengkorak kepala, warna rambut, atau dimensi-dimensi peradabannya, seperti agama, budaya, bahasa, pilihan hidup, ideologi, hingga organisasi. Diversitas tersebut sudah menjadi jalan takdir yang *nyaris* tidak dapat dihilangkan dari lingkaran kehidupan manusia.

Keniscayaan akan keragaman itu tidak terkecuali dapat dijumpai di Kotagede. Sebagaimana telah diulas dalam deskripsi Muhammadiyah yang berbasis di Yogyakarta sebelumnya, ada kajian menarik dalam bingkai masyarakat Kotagede yang sejak awal sudah diisi oleh beraneka ragam etnis, ras, budaya dan aliran kepercayaan. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari eksistensi daerah tersebut yang sempat menjadi pusat salah satu kerajaan terbesar yang ada di Jawa. Kotagede sejak tempo dulu merupakan kota kosmopolitan yang sangat kuat dan diminati para pendatang. Oleh sebab itulah, hingga hari ini Kotagede kemudian dipenuhi oleh aneka ragam identitas masyarakat. Keragaman tersebut meliputi agama, etnis, dan budaya yang lebur dalam satu kesatuan (*unity in diversity*).

Keragaman di Kotagede merupakan cerminan dari keragaman di Indonesia. Hampir semua ras, etnik, suku, dan agama ada di Kotagede. Lebih-lebih Kotagede modern telah melakukan perubahan dalam struktur kewilayahan. Muhammadiyah Kotagede bukan lagi memfokuskan diri sebagai sentra dari kebudayaan Jawa, melainkan menjadi kawasan modern yang terbuka akan berbagai khazanah dan nilai-nilai budaya yang masuk. Bekas Kraton Mataram dan berbagai tetinggalannya hanya diposisikan

³ Konteks ini sejauh pengamatan yang dilakukan oleh Heidegger di tahun 1962, sebagai basis riset yang ia kembangkan. Lihat dalam, William H. Watkins, "Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry", *Journal Winter*, Vol. 44 No. 1 (1994).

sebagai aset budaya ketimbang simbol sosial masyarakat.

Melihat Kotagede saat ini sama dengan melihat Indonesia secara umum. Pluralitas kebudayaan sebagai Indonesia dalam konteks luas menjadi hal biasa di kawasan ini. Meskipun demikian, kepedulian (*caring*) terhadap ragam budaya di Kotagede tidak boleh diabaikan. Sebab, sebagaimana yang juga membayangkan-bayangi Indonesia saat ini, potensi konflik yang berbau SARA dan semangat disintegratif tetap mengancam kawasan ini. Kenyataan inilah yang kemudian disadari oleh berbagai kalangan, termasuk Muhammadiyah. Pada faktanya, banyak masyarakat di Kotagede saat ini, tidak terkecuali Muhammadiyah, memulai memupuk kesadaran multikulturalitas warganya. Sikap ini boleh dibaca sebagai tindakan antisipatif terhadap segala kemungkinan konflik sosial yang terus mengintai.

Dalam mencapai derajat kebenaran fakta ilmiah yang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka artikel ini merupakan hasil pengembangan kajian penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis-naturalistis. Penelitian dalam pandangan fenomenologi bermakna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu.⁴ Dalam hal ini, pendekatan fenomenologis bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang sekedar berisi anjuran atau inspiratif, melainkan menyangkut makna etika dalam berteori dan berkonsep.⁵

Mengingat wilayah kota Yogyakarta cukup luas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah kecamatan Kotagede. Wilayah ini dipilih dengan pertimbangan bahwa, daerah tersebut dapat dikatakan sebagai kampung santri tertua di Yogyakarta. Hal ini didasarkan kepada usianya yang telah seumur dengan kerajaan Mataram Islam. Sedangkan kampung-kampung santri lainnya tumbuh semasa kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, pecahan dari Mataram. Daerah ini dikenal sebagai basis Muhammadiyah, sebab perbedaan jumlah anggota organisasi ini dengan kelompok lain dapat dikatakan cukup mencolok dibandingkan dengan daerah-daerah lain di

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hal. 17.

⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1990), hal. 91.

Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik dan kemasyarakatan yang ada di daerah ini banyak dipengaruhi, bahkan didominasi oleh institusi dan warga Muhammadiyah.

Dalam proses pengumpulan data, kajian ini menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Kedua metode ini lazim digunakan oleh para etnograf.⁶ Pengamatan dan wawancara dilaksanakan dengan menggunakan cara pengamatan dan wawancara deskriptif, pengamatan terfokus, wawancara struktural dan pengamatan selektif serta wawancara secara kontras.⁷ Teknik pengamatan dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif. Dengan pengamatan partisipatif atau terlibat akan memungkinkan peneliti lebih leluasa bergerak sehingga jauh dari kekakuan yang cenderung “menodai” suasana akrab yang terjalin sebelumnya. Teknik pengamatan akan sangat membantu untuk mengidentifikasi warga Muhammadiyah menyangkut pilihan strategi, pendekatan, cara dan bentuk-bentuk kegiatan dalam mensosialisasikan dan mengaktualisasikan semangat multikulturalisme.

Adapun wawancara dilakukan kepada informan yang terpilih. Informan yang dipilih terdiri atas para aktivis atau pengurus Muhammadiyah, tokoh agama/masyarakat, tokoh pemuda dan warga Muhammadiyah biasa. Pilihan ini bisa dimaklumi mengingat eksistensi mereka yang dianggap telah berperan penting dalam proses sosialisasi dan aktualisasi semangat multikulturalisme di masyarakat. Mereka diwawancarai dengan secara bebas terpimpin. Wawancara secara bebas terpimpin adalah prosedur wawancara yang mengikuti pedoman seperlunya. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan sub masalah yang diteliti, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh pewawancara.

Dengan adanya wawancara yang demikian diharapkan akan memperoleh jawaban yang sifatnya terbuka, sehingga berdasarkan jawaban yang diperoleh akan dimungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih luas lagi. Wawancara ini dipakai secara spesifik bagi orang-orang yang menjadi

⁶ Danandjaja, *Antropologi Psikologi*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 154-155.

⁷ Spradley, *Participant Observation*, (New York: Holt Rineheat and Winston, 1980).

informan yakni orang-orang yang telah terseleksi sedemikian rupa sehingga secara representatif dinilai layak untuk mendukung penelitian ini. Peneliti nantinya juga melakukan cara wawancara sambil lalu (*casual interview*) yang ditujukan kepada orang-orang tanpa melalui seleksi terlebih dahulu secara teliti, akan tetapi hanya kepada orang-orang yang dijumpai secara kebetulan. Setelah berbagai data dari sumber yang disebutkan di atas terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah analisis data. Pada tahap ini akan dilakukan terlebih dahulu klasifikasi data yang termasuk data primer dan data sekunder. Data primer merupakan dokumen-dokumen penting organisasi Muhammadiyah atau buku-buku yang ada di berbagai perpustakaan dan hasil wawancara yang telah dilakukan. Sementara data sekunder merupakan data tambahan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dinamika Internal Gerakan Muhammadiyah di Kotagede

Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, dan mengambil peran sebagai poros pembaharuan (*tajdid*) dan pemurnian ajaran Islam. Posisi ini diambil sebagai respon atas kondisi sosial masyarakat Indonesia yang kala itu menurut istilah kalangan Muhammadiyah sendiri, dilanda perilaku TBC (*tahayul, bid'ah, dan churafat*). Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah menawarkan konsep purifikasi ajaran Islam dengan satu slogannya yang sangat membumi: “kembali ke al-Qur’an dan al-Sunnah”. Jika dirinci, gerakan pemurnian yang digagas oleh Muhammadiyah tersebut meliputi dimensi teologis (*akidah*), hukum (*syari'ah*), dan moral (*akhlak*).

Meskipun respon sosial tersebut bersifat lokalistik (*keindonesiaan*), namun tidak serta-merta lahir dari kesadaran personal orang-orang Muhammadiyah itu sendiri. Gerakan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam sebelumnya sudah santer terdengar dari gerakan reformis, seperti yang digagas oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaluddin

al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridla. Kesadaran tokoh-tokoh tersebut kemudian menginspirasi para tokoh Muhammadiyah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dalam riwayatnya pernah bersentuhan dengan gerakan-gerakan tersebut, terutama pada saat beliau studi keislaman di Timur Tengah.

Seiring perjalanannya waktu, Muhammadiyah juga mengambil posisi sebagai gerakan transformatif. Dengan meretas tafsir al-Qur'an yang berwawasan sosial dan kontekstual, Muhammadiyah juga banyak terlibat dalam kegiatan amal usaha yang meliputi pendidikan, kesehatan, jaminan sosial atas anak yatim dan fakir miskin, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Kesadaran misi transformatif ini lahir dari kajian-kajian tafsir yang digelar Kiai Ahmad Dahlan. Pada saat itu, Kiai Dahlan dan para muridnya terhenti dalam momentum perenungan yang mendalam atas surah al-Ma'un. Pertama-tama dimunculkan pertanyaan-pertanyaan ontologis seputar istilah yang tertabal dalam ayat-ayat di surah tersebut, semisal apa definisi yatim dan miskin. Mereka pun berkesimpulan bahwa yatim dan miskin dalam konteks ayat tersebut tidak hanya berkisar dalam hal harta atau materi. Istilah yatim dan miskin dalam konteks ayat tersebut dapat diperluas maknanya menjadi yatim dan miskin dalam konteks ilmu pengetahuan, kesehatan, akses sosial, dan lain sebagainya. Dari konfirmasi ontologis tersebut baru kemudian mereka berpindah pada analisis epistemologis. Karena makna yatim dan miskin sangat luas, maka mereka pun mulai memikirkan bagaimana merealisasikan perintah untuk menyantuni dan mengurus mereka. Dari sanalah kemudian lahir ide untuk mendirikan sekolah, menyantuni anak-anak yatim, orang-orang fakir dan miskin, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan untuk memberi jaminan sosial atas anak yatim yang terpinggirkan karena ketidakberdayaan ekonomi. Dari sana kemudian berkembang ide-ide untuk mendirikan sekolah guru Muhammadiyah (yang sekarang dikenal dengan sekolah Muallimin dan Muallimat) dan sekolah perawat guna menyuplai kebutuhan guru dan ahli medis.

Dari riwayat interaktif tersebut maka lahirlah struktur Muhammadiyah

sebagai persyarikatan yang lengkap, sebagai organisasi yang modern dan sebagai gerakan keislaman yang kontekstual. Muhammadiyah juga telah mengalami ekspansi teritorial yang sangat pesat. Kepengurusannya telah ada di propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bahkan, kepengurusan Muhammadiyah dan amal usahanya juga ada di propinsi yang dikenal bukan basis muslim, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Itulah sebabnya, Muhammadiyah kemudian dikenal sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mendampingi NU yang massanya berjubel di mana-mana, khususnya di daerah pedesaan.

Resonansi dinamika Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang memiliki amal usaha yang cukup luas tersebut juga dirasakan hingga ke pimpinan cabang seperti halnya Cabang Muhammadiyah Kotagede. Indikasinya, Pimpinan Cabang ini juga berjibaku dalam usaha keras dalam penegakan, apa yang disebut dalam Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah ayat (1) sebagai, amar ma'ruf dan nahi munkar. Impresi tersebut semburat jelas dalam kiprah dan kinerja kepengurusan mereka (struktural) dan gerakan mereka (kultural) yang padat dengan agenda-agenda amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut.

Konteks amar ma'ruf dan nahi munkar yang dijalankan para pengurus Muhammadiyah Cabang Kotagede terbilang luas dan terpola sangat rapi. Upaya amar ma'ruf dan nahi munkar yang mereka kembangkan terbangun secara konstitutif dalam program kerja maupun amal usaha yang terdiri dari lintas sektoral dan multi segmentasi. Media amal usaha yang kerap dijumpai di Kotagede berupa taman pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) serta panti asuhan anak yatim. Selain pendidikan formal, di Kotagede juga terdapat pendidikan non-formal. Bahkan jika dikomparasi, pendidikan non-formal di Kotagede jauh lebih besar gaungnya dibandingkan pendidikan formal. Gaung tersebut sangat terasa terutama setelah munculnya taman pendidikan al-Qur'an yang bernaung di bawah lembaga AMM. Lembaga pendidikan al-Qur'an yang mengenalkan metode baru (metode Iqra) ini menjadi rujukan dan inspirasi lembaga pendidikan al-

Qur'an serupa yang ada di seluruh kawasan di Indonesia, bahkan sampai ke negara Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.

Meskipun segudang prestasi yang dicetak Muhammadiyah Cabang Kotagede sangat fantastis, namun serta-merta menjadikan para aktivis organisasi tidak seragam dalam menjalankan peran kemuhammadiyahannya. Tidak bisa dipungkiri, dalam tubuh Muhammadiyah Kotagede seringkali terjadi ledakan konflik dan gesekan antar sesama aktivis. Latar belakang individu dan interest-nya seringkali menjadi faktor utama pemantik konflik dan gesekan tersebut. Namun, usia organisasi yang boleh dibilang sangat matang untuk ukuran keindonesiaan menjadikan setiap konflik tersebut tidak berlarut-larut. Konflik-konflik internal antar sesama mereka justru menambah warna demokratis Muhammadiyah.

Bicara soal warna aktivis Muhammadiyah di Cabang Kotagede memang sangat beragam. Jika harus dibuat kategori, warna-warna tersebut merepresentasikan Muhammadiyah nasionalis, Muhammadiyah puritan, Muhammadiyah kiri, Muhammadiyah liberal, Muhammadiyah moderat, hingga Muhammadiyah abangan. Kelompok Muhammadiyah nasionalis adalah mereka yang secara politis berafiliasi dalam partai-partai nasionalis, seperti Golkar, dan Demokrat. Dalam visi mereka yang terpatri hanyalah bagaimana menegakkan negara yang egaliter, demokratis, dan toleran sesuai dengan spirit Pancasila.

Adapun Muhammadiyah puritan adalah kelompok radikal Muhammadiyah yang dalam prinsip-prinsip pemikiran keagamaannya sangat tekstualis. Sebagian besar Muhammadiyah jenis ini banyak terlibat dalam partai-partai Islam seperti PKS, PBB dan PPP. Selain partai, mereka juga ada yang terlihat dalam lingkaran ormas-ormas Islam radikal, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Ka'bah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Wajah kelompok ini terbilang sangat keras. Tidak jarang mereka melancarkan aksi penolakan dan labelisasi atas kelompok lain yang tidak sejalan dengan mereka. Mereka mengancam keras kegiatan-

kegiatan kemasyarakatan yang sudah mendarah-daging dalam denyut kultur mereka, seperti shalawatan, tahlilan, slametan, hingga upacara-upacara adat yang menandakan momen-momen tertentu dalam kalender Jawa. Mereka, disinyalir sebagai salah satu titik poin pasiva neraca Muhammadiyah di balik activa neracanya yang meliputi ranah pendidikan dan agenda purifikasinya yang tergolong sukses.

Adapun Muhammadiyah kiri adalah para aktivis Muhammadiyah yang sangat kritis melihat persoalan ketimpangan sosial. Mereka seringkali menjalankan peran oposisi terhadap status quo yang dalam sepak terjang mereka, selalu mengkritik orang lain tanpa pandang bulu. Sasaran kritik mereka tidak jarang justru orang-orang Muhammadiyah sendiri, pada di saat yang bersamaan, kebetulan menjadi birokrat. Mereka juga tidak sepakat dengan para pengurus Muhammadiyah yang memberlakukan biaya sangat tinggi kepada sekolah-sekolah yang dikembangkan Muhammadiyah. Umumnya, Muhammadiyah jenis ini dapat dijumpai dalam berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang banyak bermunculan di Yogyakarta, tidak terkecuali di Kotagede.

Adapun Muhammadiyah liberal adalah mereka yang dikenal memiliki wacana keislaman yang bebas dan kontekstual. Kebanyakan, aktivis Muhammadiyah jenis ini adalah mereka yang pernah sekolah di Luar Negeri atau para kaum muda yang banyak melahap wacana-wacana filsafat. Tidak sedikit dari mereka yang terlibat dalam kongsi-kongsi dengan fundraising asing dalam pembiayaan kegiatan mereka. Secara kuantitatif, jumlah mereka sangat kecil dibandingkan, misalnya, Muhammadiyah puritan. Sebab selalu ada stigmatisasi dan penghakiman sepihak, seperti dituduh kafir, murtad, dan lain sebagainya. Meskipun memiliki pandangan liberal, tidak sedikit dari mereka yang memilih bungkam ketimbang mempublikasikan hasil-hasil pemikirannya yang berisiko mendapat kecaman dan labelisasi kafir dari aktivis Muhammadiyah puritan atau Muhammadiyah mayoritas.

Sementara Muhammadiyah moderat adalah kelompok tengah yang lebih akomodatif dan bijak atas perbedaan. Mereka tidak terjebak dalam

tekstualisme dalam memahami keagamaan, sebagaimana juga tidak terbuai dengan nalar liberalistik. Aktivis Muhammadiyah jenis ini bisa dijumpai, dalam konteks kepartaian, dalam Partai Amanat Nasional (PAN). Kelompok Muhammadiyah ini kerap kali menjadi pihak penengah ketika terjadi ketegangan dan konflik antara komponen Muhammadiyah yang lain. Secara konsisten mereka memanasifasikan apa yang menjadi semangat Kiai Ahmad Dahlan dalam membangun karakteristik warga Muhammadiyah.

Sedangkan Muhammadiyah abangan adalah para aktivis Muhammadiyah yang tidak terlalu memperhatikan aspek prosedural dan simbolistik. Bagi mereka, Muhammadiyah hanya sebatas pergaulan sosial, selebihnya lebih menampilkan perilaku masyarakat Jawa yang njawani. Mereka, meskipun mengaku Muhammadiyah, tetap mentradisikan apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Jawa, seperti melaksanakan upacara adat di bulan Sura dan di bulan Ruwah, menjalankan tradisi tahlilan, dan memercayai mitos-mitos yang umumnya dipegang dan diyakini masyarakat Jawa, semisal kepercayaan tentang hari baik.

Wajah-wajah Muhammadiyah tersebut semuanya ada di Kotagede. Melihat fenomena tersebut, dapat dikatakan, bahwa Muhammadiyah Kotagede tergolong sangat dinamis. Mereka tidak terjebak dalam lingkup identitas tunggal dan kelompok homogen-eksklusif. Kondisi ini juga menjadi modalitas (sumber dan media) yang sangat berharga bagi Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan perilaku atau sikap multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagaimana yang akan ditunjukkan dalam sub bahasan selanjutnya.

Konstruksi Pemahaman Warga Muhammadiyah Kotagede terhadap Fenomena Multikulturalisme

Setelah mendapatkan pemahaman yang memadai seputar ragam kebudayaan yang terdapat di Kotagede, hal yang segera ingin diketahui tentunya adalah konstruk pemahaman Muhammadiyah sendiri terhadap ragam kebudayaan tersebut. Singkatnya, apakah Muhammadiyah secara

institusional maupun secara kultural memandang multikulturalisme tersebut dari sudut pandang negatif ataukah positif. Dari penelusuran peneliti, umumnya warga Muhammadiyah Kotagede memiliki cara pandang yang tak seragam mengenai multikulturalisme. Hal ini yang menjadi latar belakang dan kepentingan sebagai pemantik utama perbedaan yang muncul di tengah masyarakat.

Jika tipologi warga Muhammadiyah secara empirik terkotak-kotak dalam beberapa kategori, maka dalam konteks cara pandang terhadap multikulturalisme mereka umumnya terpola menjadi tiga faksi besar, yakni yang melihat sebagai suatu fenomena sosial yang positif, memvonis negatif, dan yang mencoba mengambil jalan tengah atau kompromistik. Kalangan Muhammadiyah liberal dan nasionalis merupakan faksi yang cenderung melihat fenomena multikulturalitas secara positif dan wajar. Bagi mereka, multikulturalisme merupakan aset bangsa yang laik disyukuri. Melalui multikulturalisme tersebut, masing-masing entitas kelompok bisa mengenal dirinya masing-masing. Sugiantoro, salah seorang aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), mengungkapkan bahwa perbedaan dalam bingkai multikulturalitas merupakan keniscayaan sejarah dan keniscayaan sosiologis. Sebagai sebuah keniscayaan tidak ada alasan *urgen* untuk menegasikannya.

“Hadirnya kelompok-kelompok lain di sekitar kita justru dapat menjadi mitra kompetitif yang sangat baik dalam mengembangkan organisasi. Mereka bisa menjadi mitra dialog dan cermin untuk melihat capaian-capaian prestasi kita. Tanpa mereka justeru kita seperti pendekar dalam dunia persilatan. Seluruh kesaktian jadinya *kan sia-sia*.⁸

Apa yang diungkapkan Sugiantoro merupakan penggalan atau potret kelompok Muhammadiyah yang melihat fenomena multikulturalisme secara positif. Dalam penilaian positif setidaknya ada beberapa variabel alasan mengapa multikulturalitas mesti disikapi secara positif. *Pertama*, multikulturalisme merupakan keniscayaan sejarah yang tidak dapat dihilangkan dari medan kehidupan sosial masyarakat. *Kedua*, multikulturalitas

⁸ Sugiantoro, Wawancara, 13 Juni 2015.

memungkinkan terjadinya dialog untuk saling melengkapi satu sama lain. Dialog konstruktif ini dalam pemahaman Gadamer, setara dengan fusi cakrawala (*the fusion of horizon*).⁹ Dari fusi cakrawala akan melahirkan nuansa saling melengkapi satu sama lain. *Ketiga*, dengan keragaman tersebut dapat mengkondisikan masyarakat hidup dalam kompetisi yang sehat. Kompetisi dapat menjadikan mereka tumbuh dan berkembang secara sehat. Bahkan seorang Weber memastikan bahwa masyarakat tidak akan progresif jika satu sama lain tidak saling berkompetisi.¹⁰

Kendati ada dari kalangan Muhammadiyah yang menilik kebudayaan secara positif, namun tidak juga ada di antara mereka yang cenderung tidak *respect* terhadap fenomena multikulturalitas. Sebagaimana besar kelompok yang merepresentasikan pandangan semacam ini adalah kalangan puritan. Kebudayaan eksternal yang paling mereka kecam adalah perbedaan di level agama dan perbedaan di segmen aliran kepercayaan. Kendati perbedaan agama dan kepercayaan merupakan fakta sejarah dan fakta sosial yang sudah mengakar dalam sejarah hidup umat manusia, namun mereka tidak bisa menilai atau menganggap positif perbedaan tersebut. Bagi mereka, Islam dengan tafsir yang diyakini merupakan kebenaran paripurna yang tidak terbantahkan.

“Dalam Islam, kemurnian akidah merupakan persoalan utama yang bersifat wajib. Kalau akidahnya saja tidak murni *alias* penuh dengan TBC (*tahayul, bid'ah, churafat*), maka belum bisa disebut Muslim dalam arti yang sebenarnya. Agama non-Islam dan ajaran kejawaen merupakan ajaran sesat, sebab dalam keyakinan mereka tidak bersih dari unsur TBC tersebut. Muhammadiyah dari dulu berusaha menyentuh mereka agar kembali kepada ajaran Islam yang benar seperti ajaran murni Nabi Muhammad SAW”.¹¹

Pandangan pak Yoyok tersebut seringkali dapat dijumpai dalam lingkaran aktivis Muhammadiyah puritan. Mereka sangat antipati terhadap perbedaan terutama yang berkenaan dengan masalah akidah. Bagi mereka perbedaan akidah bukan merupakan aset bangsa melainkan lahan dakwah

⁹ Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York: Continuum, 1989), hal. 213-23, <https://mvlindsey.files.wordpress.com/2015/08/truth-and-method-gadamer-2004.pdf>, diakses 17 Desember 2016.

¹⁰ Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 71.

¹¹ Yoyok, Wawancara, 17 Mei 2015.

yang harus diberantas Muhammadiyah. Mereka umumnya dikenal sangat keras terhadap para kelompok tersebut.

Penampilan yang sedikit teduh justru diperlihatkan kalangan garis tengah (moderat). Mereka tidak terjebak pada arus yang pertama maupun yang kedua. Untuk menilai nilai positivities dan negativitas fenomena multikulturalisme, bergantung pada bagaimana fenomena multikulturalisme diposisikan. Bagi mereka adakalanya fenomena multikulturalitas menjadi rahmat, namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi petaka. Fenomena multikulturalisme ibarat sebuah pisau, satu sisi dapat dimanfaatkan untuk membantu kinerja sehari-hari, namun tidak dapat dipungkiri akan melukai sang empunya. Potensi yang bersifat paradoksal sama kuatnya dalam fenomena multikulturalisme. Nilai positifnya dapat dihadirkan dalam konteks untuk menjaga ekuilibrium sosial, seperti saling memperkuat eksistensi masing-masing melalui mekanisme kompetisi yang sehat. Nilai negatifnya adalah ketika multikulturalisme tersebut terjebak dalam sektarianisme yang dikotomis. Jika sudah demikian, menurut Huntington, yang terhidang di depan hanyalah potensi konflik.¹²

Wajah moderat di Muhammadiyah bisa ditemukan sampelnya pada tokoh-tokoh, seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif, Abdul Munir Mulkhan, dan Kuntowijoyo. Di Kotagede sendiri ada beberapa elemen masyarakat yang terpengaruh pada tokoh-tokoh tersebut. Meskipun tidak seepistemik dan sesistematis para tokoh sekaliber Syafi'i Ma'arif, Mulkhan dan Kuntowijoyo, elemen masyarakat Kotagede yang moderat tersebut sangat akomodatif terhadap pluralitas masyarakat. Kendati spirit kemuhammadiyah yang mereka yakini sangat kontras dengan sejumlah khazanah budaya masyarakat yang ada, seperti kejawen dan sarat dengan TBC, namun mereka tidak lantas merespon dengan frontal. Mereka bisa memaklumi dan bertoleransi atas pilihan-pilihan orang lain dalam hal budaya dan keyakinan, asal tidak saling mengganggu dan memaksakan kehendak. Mereka tampak *guyub*

¹² Samuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay", *World Politics*, Vol. 17 No. 3 (1965): 386-430, <http://www.la.utexas.edu/users/chenry/core/Course%20Materials/SPH1965/0.pdf>, diakses 14 Desember 2016.

dalam beberapa kegiatan sosial yang melibatkan banyak kalangan. Ketika salah seorang warga di Kotagede meninggal, mereka tidak segan-segan membaur dengan kerabat orang yang meninggal dalam mengurus proses pemakamannya, kendati warga yang meninggal berbeda aliran dan agama.

Satu hal yang patut dicermati di sini sebagai pembeda dari kelompok pertama yang melihat multikulturalitas semata-mata positif. Mereka tidak menganggap bahwa entitas pluralitas sebagai kompetitor. Mereka justru melihat entitas lain sebagai anggota keluarga dalam kekerabatan besar (*kinship of humanism*). Asumsi kompetitor menyediakan spasi konflik. Sementara asumsi kekerabatan meretas *sense of belonging* satu sama lain.

Kelompok ini juga menekankan untuk meminimalisir konflik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari sebuah konflik kecuali anomali sosial. Tidak ada satu pun yang bisa mengembangkan hidupnya dalam lingkaran masyarakat yang demikian. Banyak sampel yang dapat ditampilkan terkait dengan hal tersebut, semisal konflik antara Islam-Kristen di Darfur atau Israel-palestina di Timur Tengah. Tatanan sosial yang melingkupi mereka mengalami anomali. Karenanya, waktu yang hadir dalam keseharian mereka lantas tidak ada lagi selain kemungkinan untuk mati. Masyarakat Kotagede yang masuk dalam kategori ini menjaga betul potensi-potensi yang meretas ke arah sana. Salah satunya adalah dengan menggalakkan dialog dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, terutama yang menyangkut wilayah-wilayah kegamaan. Misal Komaruddin, satu di antara berepa gelintir aktivis Muhammadiyah Kotagede yang cukup kuat memegang prinsip moderatisme ini.

“Muhammadiyah secara institusional memang menetapkan sejumlah ketentuan tentang akidah dan kebudayaan secara tegas. Namun kader Muhammadiyah dapat memiliki cara pandang atau tafsir yang berbeda atas ketentuan tersebut, sebagaimana ketentuan yang memberi peluang untuk dibaca dan ditafsirkan secara berbeda. *Wong* ketentuan itu sendiri dibuat berdasarkan tafsir dan analisis para pembuatnya, yakni peserta muktamar, atas apa yang dilakukan Kiai Ahmad Dahlan. Lantas di mana salahnya jika saya punya tafsir yang berbeda pula. Ketentuan tersebut memang bersifat otoritatif, tapi tafsir tidak boleh terjebak pada otoritarianisme. Muhammadiyah ini *kan* dapat diibaratkan seperti bus. Para penumpang bus ini, meski diwajibkan mengikuti prosedur sopir dan kondektur, tapi *kan* berasal dari asal yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Apakah itu

salah?”¹³

Kompromistik merupakan kata kunci untuk menggambarkan elemen Muhammadiyah yang masuk golongan moderat. Tapi kompromistik di sini tentu berbeda dengan eklektisisme. Dalam kompromistik, batas-batas identitas dan prinsip masih dipelihara dengan kuat. Secara ideologis, mereka tetap Muhammadiyah, tapi secara sosiologis tidak pernah menonjolkan keyakinan ideologisnya. Dibandingkan dengan kelompok yang lain, kelompok ini terbilang sangat minoritas di Muhammadiyah. Karena minoritas, mereka sering dikucilkan atau diacuhkan oleh para aktivis Muhammadiyah yang lain. Padahal, kelompok ini jauh lebih diterima dan lebih diapresiasi oleh kelompok eksternal Muhammadiyah.

Keterlibatan Warga Muhammadiyah Secara Institusional terhadap Fenomena Multikulturalisme di Kotagede

Jika sikap warga Muhammadiyah terhadap multikulturalitas bersifat pelangi, maka hal tersebut tidak terjadi pada wilayah institusional-struktural. Ketetapan Muhammadiyah atas fenomena multikulturalisme bersifat tunggal, sebagaimana yang terdeskripsi dalam garis kebijakan yang dikeluarkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Ketetapan ini lantas dijadikan pegangan seluruh unit pimpinan dan warga Muhammadiyah yang berada di bawah struktur Pimpinan Pusat yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Diskursivitas tentang fenomena multikulturalisme di internal Muhammadiyah relatif belakangan. Puncaknya adalah ketika terjadi sidang Tanwir di Denpasar Bali pada tahun 2002. Dari bahasan panjang lebar yang melibatkan sejumlah pengurus pusat, akademisi, dan perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dalam sidang tersebut, akhirnya tercetus sebuah ide besar tentang apa yang disebut “dakwah kultural”. Seluruh peserta sidang

¹³ Komaruddin, Wawancara, 20 Juni 2016.

memberi catatan apresiatif atas ide besar, yang sebetulnya berasal dari tokoh-tokoh seperti Kuntowijoyo, Abdul Munir Mulkan, dan Amin Abdullah.

Wacana “dakwah kultural” yang dimunculkan pada sidang tanwir tersebut merupakan konsep program yang terskema dengan apik. Ada tiga derivasi yang harus dijalankan pengurus harian Muhammadiyah di semua level pimpinan terkait dengan proyek “dakwah kultural” ini. *Pertama*, mengembangkan kembali dakwah Islamiyah. Sedangkan wawasannya meliputi wawasan keislaman dan keulamaan. Di dalamnya terkandung upaya-upaya aktualisasi dan transformasi ajaran nilai-nilai Islam untuk menjawab tantangan perubahan sosial, sekaligus juga mewariskan nilai-nilai keulamaan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moralitas bangsa. *Kedua*, mengembangkan kerja kultural untuk memberdayakan masyarakat yang berwawasan kesejahteraan. Di dalamnya terkandung upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yang meliputi segala bidang kehidupan. Pelatihan-pelatihan transformatif untuk peningkatan sosial-ekonomi masyarakat yang telah dilakukan selama ini, sangat tepat untuk lebih dikembangkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. *Ketiga*, pengembangan sarana maupun prasarana pendidikan, utamanya yang berwawasan masa depan. Era globalisasi yang meniscayakan sejarah kemanusiaan, mau tidak mau harus diantisipasi oleh Muhammadiyah, dan untuk ini kemampuan dalam penguasaan Iptek tidak bisa diremehkan.

Bertolak dari *blue print* tersebut, dakwah kultural yang hendak dikembangkan Muhammadiyah adalah dakwah kultural kreatif. Destinasi dari wacana tersebut adalah peningkatan taraf hidup umat Islam—terutama warga Muhammadiyah. Taraf hidup tersebut menyangkut seluruh aspek kehidupan sosial umat Islam, seperti ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Inti dari semua itu nyaris sama dengan apa yang digelisahkan oleh Hasan Hanafi, yakni penyikapan atas tradisi klasik (*al-turas*) yang mengakar dalam jantung kehidupan umat Islam dengan tantangan kekinian atau modernitas (*al-tajdid*). Kedua segmentasi tersebut memiliki daya picu terjadinya ketegangan yang akut di setiap pribadi umat Islam. Jika umat Islam

tidak cerdas dalam penyikapannya, maka yang terjadi hanyalah perilaku-perilaku anti-sosial, *jumud*, ekstrem, hingga opensif terhadap yang lain (*the others*).¹⁴

Dakwah kultural adalah bagian dari strategi kebudayaan dan manajemen pengelolaan sosial yang diijtihadi Muhammadiyah. Dalam konsep dakwah kultural tersebut umat Islam digiring untuk memerhatikan atau minimal menyadari arus realitas yang berkembang, baik masa lalu maupun saat ini. Termasuk juga menyadari konteks faktual seperti fenomena multikulturalitas yang niscaya dalam ruang sosial umat Islam. Pendek kata, hasil keputusan Tanwir tersebut memberikan pijakan legitimatif terhadap pengurus Muhammadiyah untuk memformat program yang berwawasan keragaman budaya, demi perbaikan kualitas kehidupan sosial umat Islam.

Selanjutnya, hasil keputusan sidang Tanwir tahun 2002 tersebut menjadi paradigma atau bingkai berpikir (*mode of thought*) Pimpinan Cabang Kotagede. Paradigma ini menjadi cangkang yang melingkupi kinerja kepengurusan dalam periode mereka. Karena bertolak dari paradigma tersebut, maka arah kinerja menjadi sangat jelas, yaitu sealur dengan wacana besar dakwah kultural.

Dari paradima tersebut maka lahirlah strategi. Strategi merupakan siasat bagaimana merealisasikan ide atau gagasan tentang dakwah kultural. Strategi institusi Muhammadiyah Kotagede terbilang cukup bervariasi. Di antaranya, yang *pertama*, adalah rekonseptualisasi visi kemuhammadiyah. Visi Muhammadiyah yang berbasis *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* masih dipertahankan. Hal yang berubah adalah pembacaannya. *Amar makruf* bukan lagi terhenti di ranah teologis dan sosiologis sempit—seperti kontekstualisasi surah al-Ma'un yang digagas Kiai Dahlan. Di era modern, makna *amar ma'ruf* sangat luas dan lengkap hingga masuk ke wilayah lintas sektoral, misalnya dalam konteks politik maupun budaya kontemporer. Demikian pula dengan

¹⁴ Hasan Hanafi, *Islamologi 3 dari Teosentrisme ke Antroposentrisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2001); lihat juga, Jarman Arroisi, "Catatan atas Teologi Humanis Hasan Hanafi", *Jurnal Kalimah* Vol. 12 No. 2 (2014): 171-196, Doi: 10.21111/klm.v12i2.235.

nahi munkar, arahnya tidak hanya menyangkut anti-TBC dalam pengertian aslinya. TBC dalam era modern yang paling mengesankan adalah penemuan sains, teknologi, dan sistem. Dengan dakwah kultural, yang diserang dan dibela bukan lagi identitas lain, melainkan nilai-nilai yang merusak kehidupan kolektivitas masyarakat. Strategi ini digunakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede untuk memupuk benih-benih spirit multikulturalitas di kalanganarganya.

Selain rekonstruksi visi, strategi lain yang dipilih Muhammadiyah Cabang Kotagede dalam merealisasikan dakwah kultural adalah rekonstruksi metodologi tafsir terhadap teks kitab suci. Rekonstruksi metodologi tafsir, sejatinya, tidak hanya terjadi di Muhammadiyah, melainkan juga Islam secara keseluruhan. Menurut Zakiyuddin Baidhawiy, belakangan, di tengah membunyahnya dobrakan-dobrakannya kajian kebudayaan terutama yang tersemat dari begawan-begawan post-modernisme, seperti yang ditandai dengan kemunculan metodologi hermeneutika, strukturalisme, semiotika, dan poststrukturalisme, membawa pengaruh yang sangat besar atas cara pandang seseorang terhadap realitas, tak terkecuali atas entitas-entitas kebudayaan.¹⁵

Resonansi semangat ini juga terasa hingga kajian keislaman kontemporer. Sehingga, masih menurut Zakiyuddin, periode kontemporer dalam skema perkembangan kajian keislaman telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru arah studi Islam. Perkembangan ini sebagai akibat langsung dari kecenderungan kecenderungan semakin diterimanya pendekatan inter dan multi disiplin, utamanya pemanfaatan teori-teori dan analisis-analisis ilmu sosial dan humaniora yang semakin canggih. Pendulum postmodernisme, poskolonialisme, dan *culture studies* telah membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi pergulatan wacana dan praksis keagamaan dalam Islam.¹⁶

Muhammadiyah termasuk kelompok Islam yang mengambil kutub arus

¹⁵ Zakiyuddin Baidhawiy dan M. Thoyibi (ed), *Reinvisi Islam Multikultural*, (Surakarta: PSB-PS Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hal. 81.

¹⁶ Zakiyuddin Baidhawiy dan M. Thoyibi (ed), hal. 82-5.

pembaharuan tersebut. Meskipun terkadang tidak diakui oleh sebagian pengurusnya (yang puritan), namun tradisi pembaharuan metodologis jelas sangat terasa di Muhammadiyah. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tokoh-tokoh progresif di Muhammadiyah seperti Amin Abdullah, Munir Mulkan, Kuntowijoyo, Muslim Abdurrahman hingga tokoh-tokoh mudanya, seperti Zakiyuddin baidhawiy, Zuly Qadir, Sukidi, dan Hilman Latief. Tokoh yang disebut ini memberi pengaruh dan warna baru yang kuta di internal Muhammadiyah. Alhasil pada beberapa waktu terakhir muncul gerakan sempalan Muhammadiyah seperti jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang cukup kuat mengusung isu pembaharuan paradigma tafsir keagamaan di Muhammadiyah.

Di tingkat bawah pun, sebagaimana yang terlihat di Kotagede, pandangan semacam itu juga cukup kental. Ada segmen Muhammadiyah cabang Kotagede yang terpengaruh oleh gerakan pembaharuan cara pandang terhadap ajaran keagamaan. Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) yang turut menggawangi pembaharuan tersebut juga hadir di tengah-tengah warga Muhammadiyah Kotagede. Kelompok ini, meskipun minoritas, berusaha keras untuk masuk ke pusaran pembuat keputusan dan kebijakan organisasi, yakni pengurus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede. Lambat laun, pengaruh mereka pun mulai menggeliat di intern organisasi Muhammadiyah Cabang Kotagede. Sehingga, sedikit demi sedikit mulai ada letupan-letupan “pemberontakan” kecil terhadap nalar keagamaan di antara para pengurus cabang.

Kedua strategi tersebut pada awalnya adalah menjadi medan pergulatan dan perdebatan kalangan aktivis Muhammadiyah Kotagede. Namun karena terjadi secara intens dan terulang-ulang, maka, seperti halnya yang dapat terjadi dalam lingkup kehidupan sosial yang lain kata Anthony Giddens, lambat laun pergulatan tersebut akan terkonversi menjadi struktur atau tatanan.¹⁷ Struktur baru tersebut menjadi bagian dari signifikasi yang

¹⁷ Anthony Giddens, *New Role of Sociological Method*, (USA: Stanford University Press, 1976), hal 231-34.

membentuk identitas Muhammadiyah baru. Di sisi lain, menurut Giddens, struktur baru tersebut juga menjadi institusi baru.¹⁸ Institusi, artinya, tatanan yang mendasari tindakan kemuhammadiyahannya warga Muhammadiyah Kotagede.

Analogi yang sederhana bisa ditemukan dalam munculnya fenomena bahasa sosial (*langue*). Menurut Saussure, sebelum menjadi *langue*, bahasa tersebut hanya mengendap sebagai bahasa individual (*parole*). Bahasa individual adalah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh yang bersangkutan. Akibat penggunaan *parole* secara massif maka lahirlah *langue* atau bahasa yang dipahami dan diakui oleh komunitasnya (publik). Bahasa publik ini akan menjadi referensi berbahasa para anggota komunitasnya.¹⁹ Pendakuan dan pembakuan strategi di Muhammadiyah yang semula menjadi wacana personal lambat laun akan menjadi wacana publik. Setelah menjadi wacana publik lantas dijadikan landasan berpikir bersama untuk melakukan praktik sosial atas nama Muhammadiyah.

Dualitas strategi yang dibahas tersebut menjadi pijakan bagaimana pengurus Muhammadiyah Cabang Kotagede dalam menyusun program kerja yang berkait-kelindan dengan fenomena multikulturalitas. Seluruh bobot nilai program kerja tersebut merupakan derivasi dari strategi dan semangat multikulturalitas. Gambaran tentang hal ini dapat dikohersensi pada satuan program kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede dalam kurun periode saat ini. Di antaranya, yang paling mencolok, adalah agenda rutinitas kajian kemuhammadiyahannya dan keislaman yang mengandung konten sensitivitas multikulturalitas. Tema-tema yang sering diulas dalam kajian tersebut adalah bagaimana posisi Muhammadiyah dalam bingkai kemajemukan sosial, seperti relasi Muhammadiyah dan budaya lokal, Islam dan agama lain, serta Muhammadiyah dan dinamika sosial kontemporer.

¹⁸ Anthony Giddens, *Central problems in social theory*, (USA: University of California Press, 1979), hal. 108-111; lihat juga, Moch Syahri, "Anthony Giddens dan Teori Strukturasi", *Makalah*, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), https://www.researchgate.net/publication/320998430_Strukturasi_Anthony_Giddens, diakses 12 Nopember 2016.

¹⁹ Ferdinand de Saussure, *Pengantar Linguistik Umum*, Penj. Rahayu S. Hidayat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hal. 431-34.

Dari kajian-kajian yang tampak sederhana tersebut ada segumpal harapan di kalangan pengurus organisasi untuk meretas sikap Muhammadiyah yang cerdas dan bijak dalam menghadapi pluralitas. Bagi mereka, sejarah masa lalu yang memerosokkan Muhammadiyah dalam kubangan konflik berlarut-larut dengan elemen-elemen Islam yang lain, terutama dengan Nahdlatul Ulama (NU) cukup menjadi pangalaman yang berharga. Selama dalam pertikaian tersebut tidak ada satu pun manfaat besar yang dapat dirasakan selain kedua organisasi ini terkurung dalam tempurung kemunduran. Sementara belantara di luar justru mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Tak pelak, konflik sesama elemen umat Islam tersebut justru mendorong pada kemunduran umat Islam di Indonesia sendiri. Lihat saja, dibandingkan dengan kelompok-kelompok Muslim di Luar Negeri, umat Islam di sini tertinggal beberapa puluh tahun di belakang mereka. Seluruh alat-alat produksi strategis hampir tak satu pun dikantongi umat Islam. Kalau pun ada skala persentasenya sangat kecil. Di level media massa yang bercorak keislaman, dengan ukuran nasional, hanya beberapa biji saja. Di antara media massa tersebut, semisal *Republika* untuk level koran, serta *Sabili*, *Hidayatullah*, *Suara Muhammadiyah*, *Muslimun*, dan *Jurnal Tashwirul Afkar*; di segmen majalah. Jumlah itu tentu sangat kontras dengan kuantitas umat Islam yang terus berjubel dan terdesak di bumi pertiwi yang kian menyempit ini.

Kajian rutin yang diadakan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede secara tentatif berlangsung setiap satu bulan sekali. Pembicara yang dihadirkan pun berasal dari ragam elemen masyarakat, selain dari internal Muhammadiyah sendiri. Hasil kajian selalu didokumentasikan dan dirilis ulang melalui media buletin dengan tiras yang tak begitu besar. Dengan pola yang telah berlangsung selama beberapa waktu tersebut, mulai terlihat geliat kesadaran di masyarakat. Sebagian dari mereka sudah tidak “buta” lagi terhadap eksistensi kelompok lain di luar Muhammadiyah.

Selain kajian, agenda kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagede yang mengolah kesadaran multikulturalitas adalah dengan mengadakan even aksidental yang melibatkan banyak elemen masyarakat. Agenda-agenda

tersebut umumnya bertepatan dengan momentum hari-hari besar Nasional, seperti hari Kartini dan HUT Kemerdekaan RI. Dalam pagelaran-pagelaran yang dilaksanakan secara bersama-sama tersebut dimaksudkan untuk menciptakan momentum komunikatif antar elemen masyarakat.

Efek yang ingin dihasilkan tentu tidak sebatas kegiatan tersebut. Melainkan juga tradisi kebersamaan dan kemitraan dalam berbagai lini kehidupan sosial masyarakat. Pendek kata, dari pagelaran-pagelaran tersebut masyarakat dilatih untuk hidup *guyub* satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, hal tersebut kemudian benar-benar membudaya di kalangan masyarakat Kotagede. Dalam berbagai acara sosial, seperti ketika ada warga yang meninggal, mereka benar-benar terlihat menyatu dan saling bahu-membahu satu sama lain.

Kedua agenda kerja tersebut semakin mendekati sempurna ketika institusi Muhammadiyah Kotagede juga membuka peluang dan akses yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk masuk dalam lembaga-lembaga mereka, seperti lembaga pendidikan, panti asuhan, maupun BMT-BMT dan koperasi-koperasi yang tersebar di sekitar Kotagede. Kebijakan ini sungguh membuat warga Muhammadiyah dan elemen masyarakat yang lain tidak memiliki sekat-sekat eksklusif yang membatasi ruang-gerak sosial mereka. Warga Muhammadiyah dan komunitas-komunitas sosial yang lain di Kotagede lantas terkondisikan dalam kebersamaan dan kesatuan yang harmonis.

Dengan demikian, secara institusional, antara Muhammadiyah dan ragam pluralitas yang lain tidak ada persoalan. Kesadaran multikulturalitas terskema dengan baik dalam konstitusi Muhammadiyah dalam program kerja organisasi. Namun apakah seluruh warga Muhammadiyah di Kotagede lantas sealur dengan kesadaran ini, rasanya tidak. Seperti yang sudah diulas sebelumnya, warga Muhammadiyah secara kolektif, terkotak-kotak dalam ragam respon dan sikap. Mereka kaya dengan tafsir dan perspektif masing-

masing akan desain dakwah kultural Muhammadiyah.

Dakwah Kultural Muhammadiyah Bagi Komponen Masyarakat: Perspektif Insider dan Outsider

Dakwah kultural diretas oleh Institusi Muhammadiyah untuk merespon tantangan multikulturalitas yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Inisiasinya sederhana, yakni bagaimana dengan dakwah kultural tersebut, Muhammadiyah mampu memainkan peran secara baik tatkala berhadapan dengan keragaman masyarakat. Peran yang dimaksud bukan sekadar untuk menarik gerbong massa sebanyak-banyaknya agar masuk ke institusi organisasi, melainkan agar Muhammadiyah memiliki energi kreatif sehingga mampu mentransformasi masyarakat; dari keberagaman yang berpotensi konflik menjadi keberagaman yang saling menguatkan satu sama lain. Sebagian pengurus pusat Muhammadiyah menyadari bahwa sikap menutup diri atau eksklusifisme dapat menjadi momok bagi Muhammadiyah sendiri. Alih-alih memajukan organisasi, eksklusifisme justru dapat menyeret Muhammadiyah menjadi "kereta usang" yang akan ditinggalkan masyarakat. Jika sudah demikian, visi besar *founding father* Muhammadiyah untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* hanya akan mengendap di pusaran wacana semata. Pilihan dakwah kultural dinilai sebagai strategi yang efektif untuk membumikan Muhammadiyah dalam lintas ruang dan waktu yang berbeda.

Dengan dakwah kultural yang dirilis pada tahun 2002 itu menjadikan Muhammadiyah seakan "lahir kembali" sebagai suatu ormas besar yang energik dan menyimpan harapan besar baru bagi masyarakat Indonesia, baik dalam konteks keislaman maupun kemanusiaan. Hal ini cukup membuat stigma Muhammadiyah sebagai organisasi puritan yang eksklusif mulai luntur secara perlahan. *Image* yang muncul justru, adalah Muhammadiyah baru yang lebih dewasa dan bervisi kemajemukan.

Angin segar semacam itu juga cukup terasa di lapisan Muhammadiyah tingkat bawah, tidak terkecuali Muhammadiyah Kotagede. *Image* yang melekat bahwa Muhammadiyah anti nilai atau kearifan lokal secara bertahap

berganti dengan citra kebalikannya. Muhammadiyah yang dinilai masyarakat selama ini sebagai lembaga yang tidak mau peduli dengan nilai kultur dan historis Kotagede segera berganti dengan asumsi masyarakat tentang Muhammadiyah sebagai organisasi massa yang menawarkan rasa empati atas kultur dan hazanah lokal Kotagede. Citra akomodasi Muhammadiyah atas kultur lokal tersebut sekaligus menjadi citra sikap serupa atas khazanah pluralitas masyarakat yang lain. Elemen-elemen masyarakat yang beragam di Kotagede, yang semula cukup resah dengan cara sosialisasi Muhammadiyah, perlahan-lahan mulai simpatik.

Dengan kebijakan dakwah kultural tersebut banyak dampak yang dituai. Bagi warga Muhammadiyah sendiri (*insider*), ada sejumlah dampak yang dirasakan dari agenda dakwah kultural tersebut. Di antaranya, *pertama*, warga Muhammadiyah dipaksa menyesuaikan diri kultur baru yang coba dibangun di lingkungan Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah yang tadinya terbiasa dengan wacana puritanisme *absolut* harus bermetamorfosa menjadi puritanisme multikulturalis. Proses adaptasi ini tentu tidak mudah. Warga Muhammadiyah Kotagede menghadapi konflik personal (*split of personality*) yang tidak main-main. Meski tidak sedikit yang berhasil dalam proses ini, warga Muhammadiyah yang mengalami kegagalan juga banyak. Warga Muhammadiyah yang berhasil umumnya berasal dari akademisi yang di didik dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti UGM, UIN dan UNY. Sementara warga Muhammadiyah yang gagal umumnya berasal dari kampus-kampus Muhammadiyah sendiri, seperti UMY dan UAD. Jika pun ada dari luar kampus tersebut mereka umumnya berasal dari konsentrasi-konsentrasi keilmuan eksak, kedokteran, dan teknik, yang memang minim akan pendalaman kajian keislaman.

Bagi warga Muhammadiyah yang berhasil beradaptasi dengan wacana dakwah kultural lantas bersikap sangat akomodatif dan toleran atas keragaman budaya masyarakat. Sebaliknya, warga Muhammadiyah yang gagal dalam beradaptasi justru menjadi tambah eksklusif. Sampel warga Muhammadiyah yang mengalami kegagalan adaptasi dapat dilihat pada figur

Bapak Yus—salah satu dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Baginya, keputusan sidang tanwir Muhammadiyah yang telah menuangkan wacana dakwah kultural merupakan keputusan yang salah kaprah. Dalam dialog bersama peneliti beliau menceritakan bagaimana al-Qur'an berbicara tentang budaya dan keragaman. Menurutnya, keragaman memang diakui eksistensi dalam al-Qur'an, tapi pengakuan tersebut tidak sama dengan membenarkan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an bahkan secara tegas Allah mengutuk umat atau kelompok masyarakat. Allah melaknat mereka karena mereka ingkar dan tidak mau bertauhid kepada secara murni (*hanif*).²⁰

Kedua, menimbulkan benih-benih resistensi yang sangat kuat. Tidak bisa dipungkiri, sejak awal terdapat elemen awarga Muhammadiyah yang memang tidak setuju dengan keputusan sidang tanwir tersebut. Ketidaksetujuan tersebut kemudian mereka ekspresikan dengan sikap perlawanan atau resistensi. Ketika sebagian warga Muhammadiyah merayakan keberagaman, mereka justru berkonsolidasi untuk mementahkannya. Melalui media-media rakyat, seperti khutbah jum'at, buletin, dan forum-forum kajian keislaman mereka kerap melancarkan kritik pedas terhadap warga Muhammadiyah pendukung multikulturalitas tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menovonis bahwa warga Muhammadiyah pro multikulturalitas bukan bagian dari organisasi.

Dampak wacana dakwah kultural yang mendorong lahirnya kesadaran multikulturalitas di kalangan Muhammadiyah, bagi kalangan non Muhammadiyah (*outsider*), memicu hadirnya dampak yang beragam. Jika digeneralisir, dampak tersebut sedikitnya ada tiga, yakni mendukung, mencibir, dan apatis. Prosentase yang pertama lebih besar daripada dua berikutnya.

Bicara soal respon orang-orang di luar Muhammadiyah (*outsider*) di Kotagede, sebenarnya cukup beragam dan unik. Bahkan Mitsuo Nakamura melakukan penelitian pada tahun 1983, yang juga melakukan penelitian

²⁰ Yus, Wawancara, 17 Juli /2016.

fenomena gerakan Muhammadiyah di Kotagede, berani mengatakannya sebagai paradoks. Nilai paradoks itu, menurut Nakamura bahkan sudah muncul sejak Muhammadiyah mulai masuk ke Kotagede. Dalam catatan Nakamura, paradoks tersebut mencakup dua poin. *Pertama*, ketika warga Kotagede secara serta merta menerima gerakan Muhammadiyah yang menawarkan pembaharuan. Artinya, mereka sangat cepat untuk meninggalkan dan menanggalkan kepercayaan lamanya yang penuh dengan nuansa kejawan (*bid'ah* dan *khurafat*).²¹ *Kedua*, ketika banyak pedagang besar dan pengrajin Kotagede yang juga mendukung gerakan Muhammadiyah, Nakamura melihat fenomena ini sebagai paradoks yang disebabkan oleh sifat pedagang sendiri yang merupakan kelompok berkarakter individualis dan melulu melihat segenap persoalan dalam kerangka untung-rugi. Bagaimana mungkin elemen masyarakat yang demikian akhirnya memilih dan menjadi pembela Muhammadiyah yang paling radikal, sedangkan mereka sendiri merupakan kelompok yang sangat apatis dengan realitas di luar kegiatan konglomerasi mereka. Para konglomerat ini, jika ditilik dari perspektif teori sosiologi Clifford Geertz²², bukanlah kelompok santri. Mereka adalah abangan murni. Jadi, nilai paradoksnya terletak pada gerakan eksplosif masyarakat abangan dalam membela dan mendukung Muhammadiyah.

Jika di awal masuknya Muhammadiyah ke Kotagede saja penuh dengan cerita paradoksal, maka hal serupa juga terjadi ketika Muhammadiyah memutar haluan baru dengan mencoba kembali memedulikan kultur lokal ataupun nilai-nilai masyarakat yang sangat beragam. Haluan baru ini kontan memicu respon dan gejolak di kalangan warga non-Muhammadiyah. Sebagian

²¹ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c. 1910s-2010*, 2nd Enlarged Edition, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ISEAS, 2012); lihat, Hilman Latief, "Menelaah Gerakan Modernis-Reformis Islam melalui Kota Gede: Pembacaan Seorang Antropolog Jepang", Book Review, *Studi Islamika: Indonesian for Islamic Studies*, Vol. 20 No. 2 (2013), https://www.researchgate.net/profile/Hilman_Latief/publication/275756526_Menelaah_Gerakan_Modernis-Reformis_Islam_melalui_Kota_Gede_Pembacaan_Seorang_Antropolog_Jepang/links/572d977208ae7441518ee9ed/Menelaah-Gerakan-Modernis-Reformis-Islam-melalui-Kota-Gede-Pembacaan-Seorang-Antropolog-Jepang.pdf, diakses 23 Desember 2016; lihat, Ikuya Tokoro, "Review", *Journal of Asian and African Studies*, No. 87 (2014); 265-266, <https://core.ac.uk/download/pdf/41885602.pdf>, diakses 23 Desember 2016.

²² Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (USA: University of Chicago Press, 1976).

besar dari gejala tersebut berupa dukungan positif. Meskipun ada sebagian mereka menilai telat apa yang dilakukan Muhammadiyah tersebut, namun mereka sangat apresiatif. Mereka menilai Muhammadiyah telah meretas kemungkinan-kemungkinan baru yang sangat menjanjikan bagi masa depan kemanusiaan dan keindonesiaan. Jika Muhammadiyah yang dominan di Kotagede memiliki kesadaran multikultural, maka hal tersebut akan menginspirasi bagi kelompok lain agar bersikap serupa. Jika semua elemen masyarakat Kotagede memiliki kesadaran multikultural, hal tersebut akan menjadi garansi utama terealisasinya hidup damai antar semua komponen pluralitas di Kotagede.

Selain mendukung, ada pula warga Kotagede non Muhammadiyah yang mencibir. Mereka, yang sedari awal kurang *respect* terhadap Muhammadiyah, menganggapnya inkonsisten. Jika sebelumnya Muhammadiyah memproklamkan diri sebagai pembaharu, mestinya klaim tersebut tetap dipertahankan sebagai identitas mereka. Dengan perubahan tersebut, identitas Muhammadiyah menjadi tidak jelas. Slogan-slogan pembaharuan yang dikumandangkannya menjadi tidak bermakna sama sekali.

Dari stigmatisasi tersebut berlanjut pada tuduhan bahwa Muhammadiyah latah. *"Jangan-jangan kelatahan tersebut bagian dari strategi marketing mereka agar Muhammadiyah bisa tetap diterima di lingkungan masyarakat yang plural,"* ungkap Soleh (bukan nama sebenarnya).²³ Para pengkritik ini sangat meragukan keseriusan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah kultural atau akomodasi atas multikulturalitas yang menjadi "komoditas" isu Muhammadiyah saat ini.

Apatisme merupakan sikap terakhir yang diperlihatkan oleh warga non-Muhammadiyah Kotagede. Apatisme berarti tidak memperdulikan sama sekali. Sikap ini di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak dulu selalu ada individu di tengah kelompok masyarakat yang tidak responsif terhadap dinamika sesamanya. Lahirnya sikap demikian berbanding lurus dengan ideologi individualisme yang merayap dalam kesadaran masyarakat Indonesia.

²³ Soleh, Wawancara, 12 Agustus 2016.

Individualisme berposisi biner dengan komunalisme. Sikap individualistik tersebut dapat menjadi momok bagi multikulturalitas itu sendiri. Dibanding dengan dua tipologi sebelumnya (pendukung dan pengkritik dakwah kultural Muhammadiyah), kelompok masyarakat ini jelas lebih berbahaya bagi visi dakwah kultural yang mulai digarap oleh institusi Muhammadiyah.

Penutup

Muhammadiyah dan Kotagede memiliki ikatan historis dan sosiologis yang sangat kuat. Ikatan historinya terletak pada konteks geografisnya. Kotagede merupakan sub-distrik dari Yogyakarta. Sementara Yogyakarta sendiri merupakan kawasan bersemainya Muhammadiyah sebagai organisasi atau gerakan pembaharuan Islam. Yogyakarta adalah pusat terbentuknya identitas Muhammadiyah. Karena termasuk sub-distrik dari Yogyakarta, resonansi kemuhammadiyahannya juga memancar dari Kotagede.

Dari aspek sosiologis dapat dilihat dalam konteks karakteristik masyarakat Kotagede. Karakter tersebut dibentuk dari sejarah Kotagede masa lalu. Kotagede masa lalu merupakan sentra peradaban Jawa, yakni tatkala Jawa dikuasai oleh Kerajaan Mataram-Islam. Sebagai sentra peradaban Jawa yang dilambungkan dengan berdirinya keraton di Kotagede, menjadikan kawasan ini sebagai kawasan kosmopolit. Ketika Kerajaan Mataram ambruk, posisi Kotagede kemudian berubah menjadi sentra kegiatan ekonomi masyarakat. Saudagar-saudagar besar banyak bermunculan dari kawasan ini. Secara jenial, masyarakat saudagar merupakan kelas masyarakat yang sangat terbuka. Karakter keterbukaan ini menjadikan masyarakatnya mudah dirasuki paham-paham atau nilai-nilai eksternal baru. Sehingga, ketika Muhammadiyah sudah berdiri, apresiasi dan kedudukan banyak bermunculan dari masyarakat Kotagede. Lebih-lebih ketika Kiai Amir, tokoh karismatik yang juga saudagar, memilih berhidmat di Muhammadiyah.

Sampai saat ini Muhammadiyah kemudian mengalami dinamika internal yang sangat pesat, dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dominasi

Muhammadiyah terlihat di berbagai lini dan segmen kehidupan sosial masyarakat Kotagede. Karena fakta inilah, Kotagede kemudian menjadi salah satu kutub penting bagi gerakan Muhammadiyah di Yogyakarta, tentunya setelah Kauman.

Menggeliatnya Muhammadiyah di Kotagede cukup memicu kontroversi dan pertanyaan besar. Masalahnya, kendati sebagian besar masyarakat Kotagede berprofesi sebagai pedagang yang berkarakter terbuka, namun identitas kultural yang melekat pada daerah ini, bagaimana pun juga, sangat sukar diberantas. Persoalannya, bagaimana Muhammadiyah yang menawarkan puritanisme mudah diterima masyarakat secara *taken for granted*. Mitsuo Nakamura, seorang Islamisis asal Jepang membaca fenomena ini sebagai paradoks.

Ketika Muhammadiyah akhirnya bisa diterima oleh masyarakat Kotagede hal tersebut menandakan bahwa organisasi ini berhasil mengatasi persoalan kesenjangan antara isu yang "dijualnya" dengan realitas masyarakat. Jika Muhammadiyah akhirnya mengalami pertumbuhan di masa sekarang, di tengah corak dan warna masyarakat yang pluralistik, maka hal tersebut juga menandakan keberhasilan Muhammadiyah secara internal dalam menyelaraskan antara visi pembaharuannya (*tajdid*) dengan realitas kultural yang berurat-berakar dalam kehidupan sosial masyarakat (*turas*). Dari riset yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan banyak fakta tentang relasi Muhammadiyah secara struktural dengan konteks masyarakat yang pluralistik tersebut. Berikut item-item kesimpulan yang telah penulis dapatkan:

Pertama, pada mulanya, Muhammadiyah Kotagede, sebagaimana konteks Muhammadiyah secara umum, memang sangat getol memperjuangkan puritanisme Islam dengan slogannya yang sangat terkenal; "Kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad." Namun, seiring waktu kemudian, Muhammadiyah mengalami dinamika internal yang sangat kontekstual. Muhammadiyah akhirnya menyadari bahwa puritanisme tidak bisa dilakukan dengan keras. Bagaimana pun juga, di eksternal Muhammadiyah, terdapat realitas masyarakat yang sangat pluralistik

(multikultural). Realitas multikultural sendiri merupakan sunnatullah yang tidak dapat diubah apalagi dihilangkan dari muka bumi. Jika Muhammadiyah menafikan multikulturalitas, maka kompatibel dengan pengingkaran terhadap sunnatullah. Namun, mengakui realitas multikultural tidak berarti membenarkan apalagi meleburkan diri, sebagaimana terlihat dalam sinkretisme atau akulturasi. Yang Muhammadiyah lebih inginkan adalah asimilasi atau toleransi pluralistik.

Kedua, dalam proses membangun kesadaran multikulturalisme, Muhammadiyah memiliki beberapa strategi. Strategi terbesar Muhammadiyah, dalam satu dasawarsa terakhir ini, terhimpun dalam diskursus "Dakwah Kultural". Dalam konsep yang dirumuskan dalam sidang Tanwir pada tahun 2002 di Bali tersebut, Muhammadiyah memilih jalan lebih dekat dan lebih akrab dengan khazanah kultural masyarakat. Inti dan tujuannya sangat jelas, yakni Muhammadiyah menginginkan suatu akselerasi positif, dari multikulturalitas yang berpotensi konflik menjadi multikulturalitas yang berkemajuan atau meningkatkan taraf kehidupan sosial masyarakat. Akselerasi ini merupakan substansi dasar dari konsep dakwah kultural Muhammadiyah. Dalam konteks Kotagede, secara institusional, Muhammadiyah mengkreasi semangat kepedulian (*caring*) atas seluruh entitas masyarakat. Muhammadiyah menganjurkan warganya agar lebih dekat dengan komunitas-komunitas lain di luar Muhammadiyah.

Ketiga, terjemahan konkret dari dakwah kultural tersebut, dalam konteks Muhammadiyah Kotagede, adalah mengagendakan sejumlah program kerja yang melingkupi semangat multikulturalisme. Di antara program yang paling menonjol adalah kajian rutin tentang tema-tema atau isu-isu tentang khazanah eksternal Muhammadiyah. Dalam kajian tersebut, selain isu yang mencerminkan multikulturalisme yang diangkat, juga mendatangkan para pembicara yang berasal dari komunitas berbeda. Sehingga, dalam kajian tersebut, berlangsung dialog yang dinamis dan alamiyah antar berbagai elemen kultural masyarakat, terutama antara Muhammadiyah dan komunitas di luar Muhammadiyah. Selain kajian, institusi Muhammadiyah Kotagede

juga menggelar sejumlah even yang melibatkan kepanitiaan bersama antar semua komponen masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arroisi, J. (2014). "Catatan atas Teologi Humanis Hasan Hanafi". *Jurnal Kalimah* (12)2: 171-196. doi: 10.21111/klm.v12i2.235.
- Azra, A. (2007). *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Impulse dan Kanisius.
- Bahtiar, A. P. (2007). "Dakwah Kultural dalam Konteks Multikulturalisme: Dialektika Agama dan Budaya yang Continuum?" Abd. Rohim Ghazali, (ed.) *Muhammadiyah Progressif Manifesto Pemikiran Kaum Muda*. Yogyakarta: JIMM-LESFI.
- Baidhawiy, Z., & Thoyibi (ed). (2005). *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: PSB-PS Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Danandjaja. (1988). *Antropologi Psikologi*. Jakarta: Rajawali.
- Gadamer, H. G. (1989). *Truth and Method*. New York: Continuum. <https://mvlindsey.files.wordpress.com/2015/08/truth-and-method-gadamer-2004.pdf>.
- Geertz, C. (1976). *The Religion of Java*. USA: University of Chicago Press.
- Giddens, A. (1976). *New Role of Sociological Method*. USA: Stanford University Press.
- _____. (1979). *Central problems in social theory*. USA: University of California Press.
- Hanafi, H. (2001). *Islamologi 3 dari Teosentrisme ke Antroposentrisme*. Yogyakarta: LKiS.
- Huntington, P. S. (1965). "Political Development and Political Decay". *World Politics* (17)3: 386-430. <http://www.la.utexas.edu/users/chency/core/Course%20Materials/SPH1965/0.pdf>.
- Latief, H. (2013). "Menelaah Gerakan Modernis-Reformis Islam melalui Kota Gede: Pembacaan Seorang Antropolog Jepang". *Studi Islamika: Indonesian for Islamic Studies* (20)2. https://www.researchgate.net/profile/Hilman_Latief/publication/275756526_Menelaah_Gerakan_Modernis-Reformis_Islam_melalui_Kota_Gede_Pembacaan_Seorang_Antropolog_Jepang/links/572d977208ae7441518ee9ed/Menelaah-Gerakan-Modernis-Reformis-Islam-melalui-Kota-Gede-Pembacaan-Seorang-Antropolog-Jepang.pdf.

- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Nakamura, M. (2012). *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c. 1910s-2010*, 2nd Enlarged Edition. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Saussure, F. (1988). *Pengantar Lingustik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt Rineheat and Winston.
- Syahri, M. (2015). "Anthony Giddens dan Teori Strukturasi". *Makalah*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. https://www.researchgate.net/publication/320998430_Strukturasi_Anthony_Giddens.
- Tokoro, I. (2014). "Review". *Journal of Asian and African Studies* (87). <https://core.ac.uk/download/pdf/41885602.pdf>.
- Watkins, H. W. (1994). "Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry", *Journal Winter* (44)1.
- Weber, M. (2006). *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yaqin, A. (2007). *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.

